

FENOMENA KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DI PULAU KALIMANTAN PADA TAHUN 2014 – 2023

Isnaini Saputri

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Jamzani Sodik*

Email: jamzani.sodik@upnyk.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Abstrak

Kelimpahan sumber daya alam sering dianggap sebagai pendorong penting pembangunan ekonomi regional. Namun, literatur ekonomi pembangunan menyoroiti sebuah paradoks yang dikenal sebagai Kutukan Sumber Daya Alam, di mana wilayah yang kaya akan sumber daya alam mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat karena ketergantungan yang berlebihan pada industri ekstraktif dan diversifikasi ekonomi yang lemah. Meskipun fenomena ini telah banyak diteliti di tingkat lintas negara, bukti empiris di tingkat subnasional, khususnya di wilayah kaya sumber daya di negara berkembang, masih terbatas.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kelimpahan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi regional di lima provinsi Pulau Kalimantan, Indonesia, selama periode 2014–2023. Untuk mengukur besarnya Kutukan Sumber Daya Alam, studi ini menggunakan Indeks Kutukan Sumber Daya Regional (RRCI), dilengkapi dengan Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam (NRDI) dan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Regional (RSDI). Selanjutnya, analisis regresi data panel digunakan untuk menguji dampak beberapa determinan terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDB), termasuk PDB awal, dana bagi hasil pertambangan (DBH), investasi domestik (PMDN), dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan ketergantungan yang lebih tinggi pada sumber daya pertambangan cenderung menunjukkan indikasi yang lebih kuat terhadap Kutukan Sumber Daya Alam. Kalimantan Tengah mencatat nilai RRCI tertinggi (0,73), disertai dengan nilai NRDI dan RSDI yang relatif tinggi. Namun, hasil regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil pertambangan dan minyak dan gas memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDB. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat ketergantungan sumber daya yang kuat, bukti secara keseluruhan tidak mendukung adanya Kutukan Sumber Daya Alam di Kalimantan selama periode penelitian.

Studi ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti empiris baru tentang Kutukan Sumber Daya Alam di tingkat provinsi di Indonesia, dengan mengintegrasikan ketergantungan sumber daya, transfer fiskal, dan indikator pembangunan manusia dalam kerangka pertumbuhan ekonomi regional.

Kata kunci : Kalimantan¹, *Indeks Kutukan Sumber Daya Alam (NRDI)*², *Kutukan Sumber Daya Alam*³, *Indeks Kutukan Sumber Daya Regional (RRCI)*⁴, *Indeks Pembangunan Berkelanjutan Regional (RSDI)*⁵

I. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor minyak dan gas. Industri minyak dan gas terus memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sektor pertambangan dan penggalian, yang meliputi ekstraksi minyak dan gas, menyumbang sekitar 10,52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketersediaan minyak dan gas serta sumber daya alam non-minyak lainnya secara historis telah menjadi sumber pendapatan pemerintah yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berskala besar. Hal ini sangat terlihat pada periode Orde Baru, ketika Indonesia mengalami puncak produksi dan pendapatan minyak dan gasnya.

Indonesia mengalami masa kejayaan minyak dan gas dari tahun 1980-an hingga awal 2000-an, di mana sektor ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Pada saat itu, Indonesia mampu memproduksi lebih dari 1,6 juta barel minyak per hari dan merupakan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Namun, seiring waktu, produksi minyak dan gas Indonesia secara bertahap menurun karena faktor-faktor seperti penipisan sumber daya, penuaan ladang minyak, dan terbatasnya kegiatan eksplorasi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021).

Hubungan antara kelimpahan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi pembangunan melalui konsep Kutukan Sumber Daya Alam (Natural Resource Curse/NRC). Konsep ini menunjukkan bahwa negara atau wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, perkembangan kelembagaan yang lebih lemah, dan diversifikasi ekonomi yang terbatas dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam lebih sedikit.

Studi empiris yang meneliti Kutukan Sumber Daya Alam di Indonesia telah menghasilkan temuan yang beragam. Fahriza A. dan Hartono D. (2018) tidak menemukan bukti fenomena Kutukan Sumber Daya Alam di Indonesia ketika menganalisis hubungan antara sumber daya minyak dan gas dengan kinerja sektor non-minyak. Studi mereka menyimpulkan bahwa sumber daya minyak dan gas telah bermanfaat bagi provinsi yang memilikinya, karena telah mendorong pertumbuhan yang lebih cepat di sektor non-minyak dibandingkan dengan provinsi lain. Kesimpulan ini didukung oleh pengaruh positif dari beberapa variabel, termasuk kontribusi minyak dan gas terhadap PDB, akumulasi modal yang diukur dengan rasio pembentukan modal tetap bruto, dan peningkatan modal manusia yang tercermin dari peningkatan angka partisipasi bersih sekolah menengah atas. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa provinsi yang kaya akan sumber daya minyak dan gas cenderung mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi di sektor non-minyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya minyak dan gas yang lebih rendah.

Meskipun studi di tingkat nasional menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami fenomena Kutukan Sumber Daya Alam (Fahriza & Hartono, 2018), studi lain menunjukkan kemungkinan terjadinya di tingkat regional. Rahma dkk. (2021), serta Sedwivia dkk. (2021), menyoroti potensi kehadiran Kutukan Sumber Daya Alam di beberapa wilayah di Indonesia. Rahma dkk. (2021) mengidentifikasi empat temuan penting mengenai hubungan antara ketergantungan regional pada sumber daya alam, yang diukur dengan Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam (NRDI), dan kinerja pembangunan berkelanjutan regional, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Regional (RSDI). Pertama, ketergantungan yang tinggi pada sumber daya pertambangan baik dalam hal kontribusi PDB maupun dana bagi hasil dari sumber daya alam (SDA DBH) tidak selalu menjamin kinerja pembangunan berkelanjutan yang tinggi. Kedua, fenomena Kutukan Sumber Daya Alam cenderung lebih sering terjadi di provinsi-provinsi dengan ketergantungan yang lebih tinggi pada sumber daya pertambangan. Ketiga, provinsi-provinsi penghasil minyak dan gas mengalami manifestasi Kutukan Sumber Daya Alam yang lebih kuat dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang terutama bergantung pada mineral dan batubara. Keempat, provinsi dengan kinerja pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghindari Kutukan Sumber Daya Alam.

Penelitian lebih lanjut oleh Amalia F. dan Emalia Z. (2022) juga meneliti hubungan antara kelimpahan sumber daya alam dan fenomena Kutukan Sumber Daya Alam. Studi mereka menggunakan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Regional (RSDI) dan Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam (NRDI) untuk mengevaluasi tingkat Kutukan Sumber Daya Alam. Mengukur besarnya Kutukan Sumber Daya Alam penting untuk menentukan apakah fenomena ini terjadi di daerah yang kaya sumber daya dan untuk menilai sejauh mana pengaruhnya terhadap pembangunan regional. Temuan menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya alam, yang diwakili oleh dana bagi hasil pertambangan dan minyak dan gas, memiliki pengaruh positif tetapi secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa Kutukan Sumber Daya Alam tidak terjadi di tingkat provinsi di Kalimantan selama periode 2014-2023. Namun, berdasarkan Indeks Kutukan Sumber Daya Regional (RRCI), provinsi dengan kekayaan sumber daya pertambangan yang lebih besar cenderung menghadapi potensi risiko yang lebih tinggi untuk mengalami Kutukan

Sumber Daya Alam.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, dengan luas sekitar 743.330 km². Aktivitas ekonomi di wilayah ini sangat didukung oleh sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Kalimantan juga menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurut data BPS (2023), pulau ini menyumbang sekitar 8-9% terhadap PDB nasional Indonesia, menjadikannya salah satu wilayah yang strategis penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertambangan, khususnya batubara dan minyak bumi, serta perkebunan kelapa sawit, merupakan kontributor terbesar bagi struktur ekonomi Kalimantan. Tabel 1.1 menyajikan data tentang distribusi sumber daya alam berbasis pertambangan di Kalimantan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terkait.

Tabel 1.1 Daftar Provinsi di Pulau Kalimantan beserta Sumber Daya Pertambangan dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 (persen)

TIDAK	Provinsi	Hasil Tambang	LPE (%)
1.	Kalimantan Barat	Bauksit, emas, antimon, dan pasir kuarsa	3,98
2.	Kalimantan Timur	Batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, dan mangan	2,97
3.	Kalimantan Tengah	Batu bara, zirkon, emas, pasir kuarsa, dan bijih besi	4,46
4.	Kalimantan Utara	Batu bara, emas, dan bijih besi	4,66
5.	Kalimantan Selatan	Batu bara, bijih besi, kaolin, fosfat	3,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa setiap provinsi di Kalimantan memiliki beragam sumber daya pertambangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kalimantan Barat memiliki kekayaan pertambangan berupa bauksit, emas, antimon, dan pasir kuarsa, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98%. Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia, juga memiliki sumber daya berupa minyak bumi, gas alam, nikel, dan mangan. Namun, tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,97%, lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kalimantan Timur memiliki sumber daya pertambangan yang signifikan, potensi tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Kalimantan Tengah kaya akan batubara, zirkon, emas, pasir kuarsa, dan bijih besi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46%, provinsi ini berkinerja cukup baik

dalam memanfaatkan potensi sumber dayanya. Kalimantan Utara, sebagai provinsi termuda, memiliki potensi besar di sektor pertambangan dengan komoditas seperti batubara, emas, dan bijih besi. Tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 4,66%, tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Kalimantan Selatan juga memiliki sumber daya pertambangan yang melimpah, seperti batubara, bijih besi, kaolin, dan fosfat. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,72%, provinsi ini terus memanfaatkan potensi pertambangannya untuk mendukung pembangunan. Namun, diversifikasi sektor ekonomi sangat penting agar ketergantungan pada pertambangan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bagaimana kekayaan sumber daya pertambangan Kalimantan telah menjadi pilar utama perekonomian, meskipun terdapat variasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antar provinsi. Fenomena ini relevan dengan konsep Kutukan Sumber Daya Alam, di mana beberapa daerah kaya sumber daya menghadapi tantangan dalam pengelolaan optimal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya diversifikasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang inklusif merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Kalimantan.

Sumber daya alam telah lama dianggap sebagai penggerak penting pembangunan ekonomi regional. Daerah yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah seringkali diharapkan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena ketersediaan komoditas berharga yang dapat dieksploitasi untuk produksi dan ekspor. Dalam konteks Indonesia, Pulau Kalimantan merupakan salah satu daerah yang paling kaya akan sumber daya, khususnya di sektor pertambangan, termasuk batubara, minyak, gas alam, dan sumber daya mineral lainnya. Sektor pertambangan memainkan peran dominan dalam perekonomian regional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi regional.

Namun, terlepas dari melimpahnya sumber daya alam, hasil pembangunan ekonomi di banyak wilayah kaya sumber daya seringkali tidak sesuai dengan harapan teoritis. Fenomena yang banyak dibahas dalam ekonomi pembangunan adalah Kutukan Sumber Daya Alam (Natural Resource Curse/NRC), yang menunjukkan bahwa wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, perkembangan kelembagaan yang lebih lemah, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah dengan sumber daya alam yang lebih sedikit. Dalam banyak kasus, ketergantungan yang berlebihan pada industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menyebabkan volatilitas ekonomi, diversifikasi industri yang terbatas, dan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pengamatan empiris di beberapa provinsi di Kalimantan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam saja mungkin tidak menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan mendorong pembangunan regional yang lebih seimbang.

Studi-studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara kelimpahan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Rahma dkk. (2021) menemukan bahwa fenomena Kutukan Sumber Daya Alam cenderung lebih kuat di provinsi-provinsi yang memiliki ketergantungan lebih tinggi pada sumber daya alam ekstraktif. Temuan mereka menunjukkan bahwa provinsi-provinsi penghasil minyak dan gas mengalami Kutukan Sumber Daya Alam yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang terutama bergantung pada mineral dan batubara. Temuan-temuan ini menyoroiti kompleksitas hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan hasil pembangunan ekonomi.

Meskipun Kutukan Sumber Daya Alam telah banyak dipelajari dalam konteks lintas negara, studi empiris yang berfokus pada wilayah subnasional di Indonesia, khususnya di Kalimantan, masih relatif terbatas. Sebagian besar studi yang ada menganalisis fenomena tersebut di tingkat nasional atau berfokus pada agregat regional yang lebih luas. Akibatnya, masih kurang bukti empiris yang meneliti besarnya Kutukan Sumber Daya Alam di berbagai provinsi di Kalimantan dan menyelidiki bagaimana kelimpahan sumber daya alam berinteraksi dengan faktor ekonomi dan sosial-ekonomi lainnya dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji besarnya Kutukan Sumber Daya Alam (KDRT) di lima provinsi Kalimantan selama periode 2014–2023. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak kelimpahan sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan beberapa variabel kontrol penting, termasuk tingkat pendapatan awal (PDB awal), Investasi Dalam Negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), dana bagi hasil dari pertambangan umum (Dana Bagi Hasil/DBH), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Studi ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada dalam beberapa hal. Pertama, studi ini memberikan bukti empiris tentang fenomena Kutukan Sumber Daya Alam di tingkat provinsi di Kalimantan, yang masih relatif kurang dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Kedua, dengan menggabungkan variabel ekonomi, fiskal, dan pembangunan manusia secara

simultan, studi ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif tentang penentu pertumbuhan ekonomi regional di daerah kaya sumber daya. Ketiga, temuan studi ini memberikan implikasi kebijakan penting bagi para pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan industri, khususnya dalam merancang strategi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendorong diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan.

Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan Kutukan Sumber Daya Alam, memperkuat sektor ekonomi non-ekstraktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan data panel dari lima provinsi di Pulau Kalimantan yang mencakup periode 2014–2023. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis menggunakan regresi data panel dengan metode Generalized Least Squares (GLS) untuk menguji fenomena Kutukan Sumber Daya Alam.

$$GRDP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBT_1_{it-1} + \beta_2 DBHT_{it} + \beta_3 PMDN_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

GRDP	: Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)
PDRBT_1t-1	: Pendapatan awal atau GRDPt-1 (Miliar Rupiah)
DBHT	: Dana Bagi Hasil Pendapatan Pertambangan (IDR)
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri (rupiah)
HDI	: Indeks Pembangunan Manusia
β_0	: konstanta

III. Hasil dan Diskusi

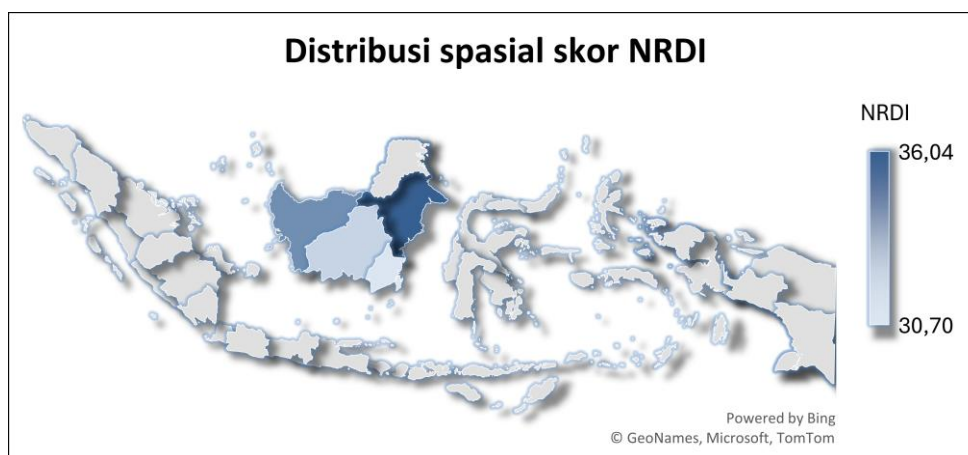
3.1. Jumlah nilai Kutukan Sumber Daya Alam di lima provinsi di pulau Kalimantan pada tahun 2014 – 2023.

Meskipun analisis indeks menunjukkan potensi gejala NRC di beberapa provinsi, hasil regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil pertambangan masih memberikan kontribusi positif terhadap PDB regional. Namun, provinsi-provinsi dengan ketergantungan sumber daya yang tinggi dan kinerja pembangunan yang rendah tetap rentan, yang menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi, perluasan investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 3.1 Hasil perhitungan Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam (KDRT) lima provinsi di pulau Kalimantan (persen)

Provinsi Indikator	Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam			
	IPDBRT	IDBHT	NRDI	Pangkat
Kalimantan Timur	50,62	21,46	36,04	1
Kalimantan Barat	39,99	28,31	34,15	2
Kalimantan Utara	42,53	25,38	33,95	3
Kalimantan Tengah	48,77	14,03	31,40	4
Kalimantan Selatan	38,50	23,03	30,70	5

Sumber: BPS dan DJPK Kemenkeu, data diolah 2025



Sumber: data yang telah diolah, 2025

Gambar 1 Peta distribusi NRDI di 5 provinsi di pulau Kalimantan

Terlihat pada Gambar 1. provinsi yang memiliki nilai NRDI tertinggi dibandingkan empat provinsi lainnya, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai NRDI sebesar 36,04% (30% NRDI < 60%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Kalimantan Barat tetapi 4 provinsi lainnya memiliki tingkat ketergantungan pada sektor pertambangan dan minyak dan gas dengan kategori sedang. Hasil ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rahma (2020), penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2020) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai indeks kutukan sumber daya alam tertinggi di antara provinsi-provinsi lain yang kaya akan sumber daya alam. Ini berarti Kalimantan Timur mengalami fenomena ketergantungan yang relatif besar di antara semua provinsi di Kalimantan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa fenomena kutukan sumber daya alam yang tinggi terjadi di daerah yang biasanya memiliki kondisi sebagai berikut: 1) tingkat korupsi yang tinggi; 2) kapasitas dan integritas kepala daerah yang rendah; 3) sektor ekonomi selain sub-sektor sumber daya alam yang kurang berkembang; 4) penyimpangan yang tinggi dalam pemberian izin usaha pertambangan; dan 5) alokasi pengeluaran yang tidak memadai untuk meningkatkan modal

manusia dan mendukung kegiatan ekonomi (Rahma dkk., 2020)

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata PDB per kapita sektor pertambangan berdasarkan data yang diberikan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata PDB sektor pertambangan tertinggi di Kalimantan, yaitu 226,867 miliar rupiah per tahun pada periode 2014-2023. Angka ini jauh melebihi provinsi lain, bahkan lebih dari enam kali lipat Kalimantan Selatan yang berada di peringkat kedua (32,553 miliar rupiah). Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil pertambangan terbesar di Indonesia, terutama di sektor batubara dan minyak bumi. Potensi sumber daya alam yang besar dan infrastruktur pertambangan yang berkembang menjadikan sektor ini sebagai motor utama perekonomian provinsi. Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur pada sektor pertambangan juga terlihat pada ketergantungan fiskalnya, yaitu PDB pertambangan dan minyak dan gas. Dengan rata-rata distribusi PDB pertambangan dan minyak dan gas per tahun selama 2014-2023 sebesar Rp 1.931.396.116, angka tertinggi dibandingkan dengan jumlah PDB yang diterima provinsi lain.

Sebaliknya, Kalimantan Selatan memiliki nilai NRDI terendah dibandingkan empat provinsi lainnya, yaitu 30,70%. Meskipun sektor pertambangan di Kalimantan Selatan cukup besar (terutama batubara), sektor ini tidak mendominasi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan Kalimantan Timur, di mana sektor pertambangan merupakan kontributor utama terhadap PDB. Keberadaan sektor-sektor penting lainnya menyeimbangkan struktur ekonomi Kalimantan Selatan. Tingkat ketergantungan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan lebih rendah karena perekonomian provinsi ini didukung oleh sektor-sektor besar lainnya, seperti perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Diversifikasi ekonomi yang kuat membuat Kalimantan Selatan lebih tahan terhadap fluktuasi di sektor pertambangan, sehingga perannya dalam total PDB tidak terlalu dominan dibandingkan sektor-sektor lainnya.

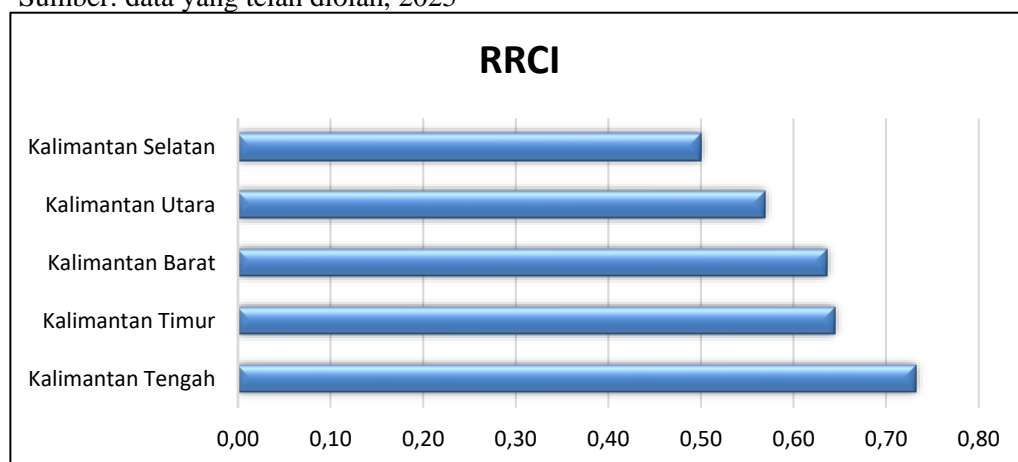
Tabel 3.2 Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Regional (RSDI) lima provinsi di pulau Kalimantan (persen)

Indikator Provinsi	Indeks Pembangunan Berkelanjutan Regional						
	IEG	100-IPOV	HDI	100-GI	EQI	100-IUNP	RSDI
Kalimantan Barat	74,64	9,64	71,50	67,00	67,09	77,60	51,17
Kalimantan Timur	51,87	47,16	75,74	66,55	75,89	31,41	52,55
Kalimantan Tengah	82,87	70,31	73,57	66,83	70,27	92,20	35,53
Kalimantan Utara	79,24	31,23	75,62	70,10	70,43	72,000	63,65
Kalimantan Selatan	70,74	90,45	67,44	66,51	70,21	85,17	74,55

Sumber: data diolah, 2025

Indeks Pembangunan Berkelanjutan Daerah (RSDI) adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan pembangunan daerah, dan mengukur tingkat pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai RSDI, semakin baik kinerja pembangunan provinsi (Ridena dan Hermawan 2021). Berdasarkan tabel, Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan nilai RSDI tertinggi yaitu 74,55. Ini berarti bahwa kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kategori tinggi di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan ($RSDI \geq 60\%$). Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan yang terus menurun dari tahun 2014-2023. Pemerintah Kalimantan Selatan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan pada periode 2014-2023 dalam kisaran 4%, menjadikannya provinsi dengan angka kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan. Upaya ini didukung oleh penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, hal ini juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan yang memiliki persentase rendah dibandingkan dengan 4 provinsi lainnya.

Sumber: data yang telah diolah, 2025



Gambar 2 Diagram perhitungan RRCI 5 provinsi di Kalimantan

Menurut Saptawartono, dkk. (2024), sumber daya alam pertambangan yang melimpah di Kalimantan Tengah cenderung kurang dikelola dengan baik, sehingga banyak ekspansi besar-besaran dilakukan oleh perusahaan atau bahkan masyarakat. Sebagai contoh yang disebutkan dalam penelitian Saptawartono, dkk. adalah keberadaan penambangan emas tanpa izin (PETI). Hal ini dapat berdampak pada potensi Pendapatan Negara Non-Pajak (PNBP) dan penurunan penerimaan pajak negara. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM),

dan dapat memicu kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Lingkungan dkk. 2024).

Oleh karena itu, tampak bahwa Kalimantan Tengah tidak mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyatnya yang sebanding dengan nilai kekayaan sumber daya alam yang telah dieksploitasi dari wilayahnya (Harefa, SE, ME 2019). Sementara Kalimantan Timur, meskipun memiliki NRD yang tertinggi, menunjukkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang lebih efisien dan diversifikasi ekonomi yang lebih baik daripada Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, RRCI yang tinggi di Kalimantan Tengah mencerminkan dampak negatif eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali terhadap perekonomian lokal. Hal ini juga menegaskan temuan penelitian Rahma dkk (2021) yang menunjukkan bahwa meskipun sejumlah penelitian mengatakan bahwa fenomena NRC di Indonesia tidak muncul pada skala nasional, fenomena NRC berpotensi terjadi pada tingkat regional (provinsi) (Rahma dkk., 2021). Penelitian Sedwivia dkk (2021) menyatakan bahwa ada kemungkinan kutukan sumber daya alam di Indonesia. Studi ini menemukan hubungan negatif antara ketergantungan sumber daya alam dan pertumbuhan output ekonomi. Pendapatan pertambangan dan pendapatan minyak dan gas mengindikasikan adanya kutukan di Indonesia (Ridena & Hermawan, 2021).

3.2. Hasil estimasi regresi

Estimasi regresi digunakan dalam analisis data untuk memperkirakan tiga model yang dapat digunakan dengan data panel (Gujarati, 2003). Untuk menghasilkan estimasi dengan model yang tepat diperlukan pengujian spesifikasi model. Pengujian dilakukan untuk menentukan model terbaik, di mana model efek umum dan model efek tetap diuji menggunakan Uji Chow. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan efek tetap dengan efek acak. Uji Lagrange Multiproper atau uji LM untuk efek acak dengan efek umum. Berdasarkan pemilihan model terbaik yang telah dilakukan sebelumnya, Model Efek Tetap menjadi model terbaik yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil Model Efek Tetap (Economics et al. nd).

Tabel 3.3 Hasil Estimasi Model Efek Tetap

Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	Statistik t	Kemungkinan
C	-155524.4	56149.10	-2.769.846	0,0084
PDRBT_1	0.418001	0.114709	3.644002	0,0007
DBHT	3.95E-06	1.67E-06	2.359438	0,0231
PMDN	0,687998	0.151956	4.527603	0,0001
IPM	3.556443	1.028439	3.458097	0,0013

Sumber: data diolah, Eviews 12

Konstanta sebesar -155524,4 dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang mencerminkan perubahan PDB jika semua variabel independen (PDB_1, DBHT, PMDN, dan HDI) dianggap tetap atau konstan. Dalam hal ini, nilai PDB akan berubah sebesar 155524,4 miliar rupiah dengan asumsi semua faktor lain tidak berubah atau konstan. Berdasarkan hasil estimasi regresi pada tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa probabilitas variabel DBHT adalah 0,0231, probabilitas PMDN adalah 0,0001, probabilitas PDB_1 adalah 0,0007, dan nilai probabilitas HDI adalah 0,0013, yang berarti bahwa variabel DBHT, PMDN, PDB_1, dan HDI memiliki pengaruh signifikan pada tingkat alfa 5% karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% (0,05).

Tabel 3.4 Uji signifikansi parameter individual (uji t statistik)

Variabel	Statistik t	Kemungkinan
C	-2.769.846	0,0084
PDRBT_1	3.644002	0,0007
DBHT	2.359438	0,0231
PMDN	4.527603	0,0001
IPM	3.458097	0,0013

Sumber: data diolah, Eviews 12

Berdasarkan hasil estimasi dan observasi, diperoleh derajat kebebasan ($df = (nk)$, n adalah jumlah data observasi dan k adalah jumlah variabel. Kemudian diperoleh $df = (50-5)$, $df = 45$ di mana nilai T-tabel dengan alfa T-tabel 5% (0,05) adalah 1,676. Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 3.4, menunjukkan hasil statistik T dengan t-tabel untuk setiap variabel penelitian sebagai berikut

- 1) Hasil analisis model Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel PDRBT_1 memiliki nilai probabilitas (P-Value) sebesar $0,0007 < 0,05$ dan statistik T sebesar $3,644002 > 1,676$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pdrbt_1 secara individual berpengaruh signifikan terhadap PDB
- 2) Hasil analisis model Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel dbht memiliki nilai probabilitas (P-Value) sebesar $0,0231 < 0,05$ dan statistik T sebesar $2,359438 > 1,676$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dbht secara individual berpengaruh signifikan terhadap PDB
- 3) Hasil analisis model Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel pmdn memiliki nilai probabilitas (P-Value) sebesar $0,0001 < 0,05$ dan statistik T sebesar $4,527603 > 1,676$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pmdn secara individual berpengaruh signifikan terhadap PDB
- 4) Hasil analisis model Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel HDI memiliki nilai probabilitas (P-Value) sebesar $0,0013 < 0,05$ dan statistik T sebesar $3,458097 > 1,676$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel HDI secara individual berpengaruh signifikan terhadap PDB

Tabel 3.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

<i>Variabel Independen</i>	<i>Statistik F</i>	<i>Probabilitas (statistik F)</i>	Tabel F
	4529.562	0,0000	2.5787

Sumber: data diolah, Eviews 12

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai derajat kebebasan untuk pembilang (dfn) melalui perhitungan $(k - 1)$ diperoleh nilai 4. Untuk perhitungan derajat kebebasan untuk penyebut (dfd) melalui perhitungan $(n - k)$ diperoleh nilai 45. Berdasarkan perhitungan ini dapat diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,5787. Hasil perhitungan regresi yang menghitung variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi alfa 5% (0,05) diperoleh nilai F-statistik sebesar 4529,562. Maka, F-statistik $(4529,562) > F$ -tabel $(2,5787)$. Hal ini juga dapat dilihat melalui tabel 3.5, probabilitas F yang menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05). Ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan F-tabel dengan nilai f-hitung dan probabilitas dapat disimpulkan secara bersama-sama atau simultan variabel GRDP_1, DBHT, PMDN, dan HDI mempengaruhi Produk Domestik Bruto Regional (PDB).

3.3. Pengaruh tingkat pendapatan awal terhadap PDB

Pendapatan awal GRDP adalah GRDP nominal pada periode tahun sebelumnya. Hipotesis untuk GRDP_1 adalah bahwa variabel GRDP_1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi endogen dikembangkan oleh para ekonom seperti Romer (1986) dan Lucas (1988). Dalam teori ini, tingkat pendapatan awal (GRDP awal) dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal fisik, modal manusia, dan teknologi. Daerah dengan pendapatan awal yang tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap investasi, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan daerah tersebut untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara konsisten.

Dalam model neoklasik pertumbuhan ekonomi (Solow 1956), pendapatan awal yang lebih tinggi dianggap memberikan manfaat awal bagi suatu wilayah. Wilayah tersebut memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong investasi yang lebih tinggi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun teori konvergensi cenderung menunjukkan bahwa wilayah miskin akan menyusul wilayah kaya (konvergensi), wilayah dengan tingkat pendapatan awal yang tinggi masih dapat mempertahankan keunggulan melalui inovasi dan peningkatan produktivitas (Solow 1956).

Berdasarkan hasil regresi dengan model Fixed Effect pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa variabel GRDP_1 GRDP memiliki pengaruh positif terhadap GRDP provinsi di pulau Kalimantan dengan koefisien regresi sebesar 0,418001, yang berarti bahwa dengan peningkatan nilai GRDP awal sebesar 1% akan meningkatkan GRDP sebesar 0,418001%. Dengan nilai statistik T sebesar 3,644002 yang lebih besar dari T-tabel sebesar 1,676, berarti bahwa GRDP_1 GRDP memiliki pengaruh signifikan terhadap GRDP. Hasil ini sesuai

dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen dan model neoklasik pertumbuhan ekonomi (Solow 1956) .

3.4. Pengaruh pembagian pendapatan pertambangan terhadap PDB regional

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model Fixed Effect pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa variabel DBH pertambangan dan minyak dan gas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan koefisien regresi sebesar 0,00000395, artinya jika terjadi peningkatan DBH pertambangan dan minyak dan gas sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan PDB sebesar 0,00000395%. Dengan nilai statistik T sebesar 2,359438 yang lebih besar dari T-tabel sebesar 1,676, artinya DBHT memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena kutukan sumber daya alam berpotensi terjadi di provinsi di pulau Kalimantan meskipun skala ketergantungannya pada sektor pertambangan. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam, terutama pertambangan dan minyak dan gas, justru memiliki kesejahteraan yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi bahwa variabel DBH pertambangan dan minyak dan gas berpengaruh positif terhadap arah variabel PDB.

Studi lain dengan hasil yang sama adalah penelitian dari Amelia F (2022) yang menunjukkan bahwa, sebagai hasilnya mereka tidak menemukan kutukan sumber daya alam di tingkat provinsi di Indonesia. Hal ini juga dijelaskan melalui penelitian bahwa Dana Pertambangan dan Minyak dan Gas sebagai variabel utama dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera. Artinya, ketika terjadi peningkatan dana pertambangan dan minyak dan gas, akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan. Sehingga fenomena Kutukan Sumber Daya Alam tidak terjadi di provinsi pulau Sumatera. Karena dengan hasil variabel koefisien kelimpahan sumber daya alam yang diprosikan dengan dana bagi hasil pertambangan dan minyak dan gas menunjukkan koefisien pertumbuhan ekonomi yang positif.

Studi lain dengan hasil serupa adalah penelitian Fahriza dan Hartono (2017), yang hasilnya menunjukkan tidak adanya kemungkinan kutukan sumber daya alam di tingkat provinsi di Indonesia. Arah pengaruh positif DBH pertambangan dan minyak dan gas dalam penelitian ini diperkirakan terjadi karena pendapatan dari dana bagi hasil pertambangan dan minyak dan gas sepenuhnya digunakan untuk pengeluaran di sektor yang lebih produktif sehingga mendorong sektor lain untuk berkembang dan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Fahriza 2017) .

Tabel 3.6 DBH pertambangan dan minyak dan gas (juta), GRDP (miliar) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 2014-2023

Indikator Bertahun-tahun	Kalimantan Tengah		Kalimantan Timur	
	DBHT	PDRB	DBHT	PDRB
Tahun 2014	157679912	73725	999267569	440676
Tahun 2015	221903960	78891	2256727600	446029
Tahun 2016	131232255	83900	1530236206	439004

Tahun 2017	145554992	89545	1372411837	452742
Tahun 2018	116909518	94566	1688060575	464694
Tahun 2019	166792875	100349	2450157145	486523
Tahun 2020	162107907	98934	1818760366	472393
Tahun 2021	157422938	102482	1187363587	484440
Tahun 2022	184906873	109095	1719708221	506159
Tahun 2023	1090592471	113612	4291268056	537630

Sumber: BPS dan Djpk Kemenkeu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan data dari 2 provinsi yang memiliki nilai rrci tertinggi pada Tabel 3.6, terlihat bahwa Kalimantan Tengah memiliki DBH yang jauh lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur. Namun, pertumbuhan PDB di Kalimantan Tengah relatif stabil, meskipun masih tertinggal dibandingkan Kalimantan Timur. Jika ditelaah lebih dalam, studi empiris menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah mengalami ekspansi besar-besaran di sektor pertambangan, terutama batubara dan emas. Ekspansi ini sering dikaitkan dengan degradasi lingkungan, konflik lahan, dan ketidakmerataan distribusi hasil ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Ross (2001) yang menyatakan bahwa daerah dengan intensitas eksploitasi sumber daya yang tinggi cenderung menghadapi stagnasi ekonomi akibat alokasi sumber daya yang tidak merata, manajemen pendapatan yang lemah, dan dampak negatif pada sektor lain seperti pertanian dan kehutanan (Komarulzaman dan Alisjahbana).

Kalimantan Tengah, meskipun menghadapi ekspansi sektor pertambangan, tidak memiliki penerimaan DBH yang signifikan, yang dapat mengindikasikan lemahnya redistribusi keuntungan dari eksploitasi tersebut kepada masyarakat setempat. Ketergantungan pada sektor pertambangan tanpa diversifikasi ekonomi menyebabkan kurangnya pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor lain, seperti manufaktur atau jasa, yang dapat memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Selain itu, dampak lingkungan dari pertambangan seringkali memengaruhi produktivitas sektor lain, seperti pertanian dan kehutanan, yang masih menjadi basis ekonomi sebagian besar masyarakat.

Di sisi lain, Kalimantan Timur menunjukkan ketergantungan yang jauh lebih besar pada sektor minyak dan gas serta pertambangan, sebagaimana tercermin dalam jumlah DBH yang diterima. Namun, ketergantungan ini membuat Kalimantan Timur sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Studi empiris oleh Auty (1993) menunjukkan bahwa daerah yang sangat bergantung pada pendapatan dari sumber daya alam cenderung menghadapi gejala Dutch Disease, di mana sektor non-ekstraktif menjadi kurang kompetitif karena alokasi sumber daya yang berpusat pada sektor pertambangan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan PDB Kalimantan Timur yang, meskipun lebih besar, tidak secara signifikan mencerminkan dampak positif DBH yang diterima dalam diversifikasi ekonomi atau pembangunan berkelanjutan.

3.5. Pengaruh investasi domestik (PMDN) terhadap PDB

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model Fixed Effect pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa variabel PMDN berpengaruh signifikan terhadap GRDP. Dengan

koefisien regresi sebesar 0,687998, artinya jika terjadi peningkatan PMDN pertambangan dan minyak dan gas sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan PDB sebesar 0,687998%. Dengan nilai statistik T sebesar 4,527603 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,676, PMDN berarti memiliki pengaruh signifikan terhadap GRDP. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi domestik memiliki hubungan proporsional langsung dengan PDB, yaitu, ketika investasi domestik meningkat, maka PDB juga akan meningkat.

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar, Harrod dan Domar menyatakan bahwa investasi merupakan kunci yang dapat memberikan fungsi penting bagi proses pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif investasi domestik dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau Kalimantan, didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Fitriyani & Fisabilillah (2022) yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan investasi langsung domestik dan asing memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PDB. Semakin tinggi aktivitas investasi domestik, semakin baik kinerja PDB (Fitriyani dan Fisabilillah 2022) . Dan ada juga penelitian dengan hasil yang sedikit berbeda, yaitu penelitian oleh M. Safri, Umiyati Etika (2017) yang menjelaskan bahwa FDI memiliki dampak negatif yang signifikan, tetapi FDI sebenarnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi (Humaini, Safri, dan Umiyati 2017) .

3.6. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDB

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model Fixed Effect pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa variabel HDI secara signifikan mempengaruhi GRDP. Dengan koefisien regresi sebesar 3,556443, artinya jika terjadi peningkatan HDI sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan PDB sebesar 3,556443%. Dengan nilai statistik T sebesar 3,458097 yang lebih besar dari T-tabel sebesar 1,676 berarti HDI memiliki pengaruh signifikan terhadap GRDP. Hal ini menunjukkan bahwa variabel HDI memiliki hubungan yang proporsional terhadap PDB, yaitu, ketika HDI meningkat, maka PDB juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen menurut Paul Romer & Robert Lucas yang menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia, teknologi, dan inovasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. HDI, sebagai indikator pembangunan manusia, mencerminkan peningkatan modal manusia. Ketika suatu daerah berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, pengembangan teknologi, dan efisiensi ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan PDB regional (Paul M. Romer, 1986) (Lucas, 1988).

Peningkatan HDI meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan yang lebih baik, kondisi kesehatan yang optimal, dan daya beli yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Teori Modal Manusia (Teori Modal Manusia Gary Becker), yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Weiss, 2015). Selain itu, Teori pertumbuhan endogen (Paul Romer, Robert Lucas) juga relevan, karena menekankan bahwa investasi dalam modal manusia, teknologi, dan inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Paul M. Romer 1986) (Lucas 1988) .

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, tujuan penelitian ini telah tercapai dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Pertama, berdasarkan hasil RRCI, provinsi yang memiliki nilai RRCI tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai RRCI 0,73, kemudian peringkat kedua adalah Kalimantan Timur dengan nilai 0,65. Dengan nilai NRDI tertinggi, hal ini juga membuktikan bahwa sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tersebut selama periode 2014-2023 relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, di mana subsektor pertambangan batubara dan emas mendominasi. Dengan nilai RRDI yang rendah. Melalui hasil perhitungan RRCI, dapat disimpulkan bahwa fenomena NRC lebih rentan terjadi di provinsi-provinsi yang lebih bergantung pada sumber daya pertambangan tanpa pengelolaan yang tepat. Provinsi yang rentan terhadap NRC cenderung tidak mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyatnya yang sebanding dengan nilai kekayaan sumber daya alam pertambangan yang telah dieksploitasi dari bumi di wilayahnya.

Kedua, berdasarkan estimasi regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan PDB awal, DBH sektor pertambangan, PMDN, dan HDI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDB 5 provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2014-2023. Hal ini dapat terjadi karena daerah dengan pendapatan awal yang tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap investasi, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan daerah tersebut untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara konsisten dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. DBH pertambangan memiliki pengaruh positif terhadap PDB karena ketika terjadi peningkatan dana bagi hasil pertambangan, akan diikuti oleh peningkatan PDB. Sehingga, fenomena Kutukan Sumber Daya Alam tidak terjadi di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan karena koefisien DBH menunjukkan angka positif terhadap PDB. Kemudian PMDN, ketika investasi domestik meningkat, yang akan terjadi pada PDB akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak aktivitas investasi domestik meningkat, semakin baik kinerja PRPD. HDI, sebagai indikator pembangunan manusia, mencerminkan peningkatan modal manusia yang dapat mendorong peningkatan pendapatan di suatu daerah. Ketika suatu daerah berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, mereka menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi inovasi, pengembangan teknologi, dan efisiensi ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan PDB regional. Peningkatan HDI akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan yang lebih baik, kondisi kesehatan yang optimal, dan daya beli yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil diskusi dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan atau pihak lain. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut; Pertama, diperlukan upaya untuk mengurangi potensi kutukan sumber daya alam dengan mengembangkan saluran alternatif seperti melalui pengembangan keuangan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan akses modal melalui KUR dengan bunga rendah untuk mengembangkan usaha bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata, membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil dan mendorong masyarakat untuk menggunakan platform keuangan digital, serta melakukan pelatihan literasi keuangan melalui

bank-bank daerah. Kedua, karena Pertambangan DBH memiliki pengaruh positif terhadap PDB, perlu ada cara untuk mengoptimalkan penggunaan DBH agar dapat terus meningkatkan PDB, seperti menggunakan pendapatan Mineral dan Batubara Pertambangan Umum DBH dengan memperhatikan prioritas daerah seperti sektor kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan DBH untuk membangun area budidaya ikan air tawar dan laut dengan teknologi modern, seperti *biofloc* atau *integrated multirophic aquaculture* (IMTA) sehingga sektor lain di luar pertambangan dapat secara langsung berkorelasi dengan mendorong sektor lain dan meningkatkan perekonomian daerah.

Ketiga, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IMB) di Kalimantan, perlu dikembangkan dalam beberapa aspek, salah satunya dengan menerapkan program cakupan Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem terpadu dan digitalisasi layanan kesehatan, memperluas jangkauan subsidi pembayaran premi kesehatan BPJS bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah pedesaan, serta menerapkan program Kota Pintar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Keempat, mendorong peningkatan investasi di sektor berkelanjutan, dengan memberikan insentif keuangan untuk proyek-proyek seperti proyek teknologi hijau melalui skema pembiayaan hijau. Serta memberikan akses kredit lunak kepada bisnis yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Rekomendasi yang diharapkan dapat diterapkan oleh penelitian masa depan meliputi, penelitian lebih lanjut dapat memanfaatkan pendekatan interdisipliner dengan tidak hanya menggabungkan perspektif ekonomi tetapi juga perspektif lain seperti sosial dan lingkungan. Selain itu, penelitian masa depan dapat mencakup variabel lain, seperti kualitas lembaga, tingkat korupsi, efisiensi pengelolaan sumber daya, atau pengaruh kebijakan fiskal dalam mengurangi dampak Kutukan Sumber Daya Alam. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan dampak Kutukan Sumber Daya Alam di Kalimantan dengan daerah-daerah kaya sumber daya lainnya di Indonesia (misalnya, Papua atau Sumatera). Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh kebijakan lokal dan konteks regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Finka, dan Zulfa Emalia. 2022. "Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam Dan Kutukan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera." 01(5): 737–50.
- Auty, Richard M. 1994. "Reformasi Kebijakan Industri di Enam Negara Industri Baru yang Besar: Tesis Kutukan Sumber Daya." *Pembangunan Dunia* 22(1): 11–26.
- Auty, Richard M. 1998. "Keberlanjutan Sosial dalam Pembangunan Berbasis Mineral." *Jurnal Pembangunan Internasional* 10(4): 487–500.
- Bishoge, Obadia Kyetuza, dan Benatus Norbert Mvile. 2020. "Kutukan Sumber Daya dari Sektor Minyak dan Gas Alam: Bagaimana Tanzania Dapat Menghindarinya dalam Kenyataan?"
- Economic, Esensial OF dkk. *Seri McGraw-Hill* .
- Fahriza, Ahmad. 2017. "PENGARUH MINYAK DAN GAS TERHADAP KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL: SEBUAH KUTUKAN ATAU ANUGERAH? Ahmad Fahriza." (32).

- Fitriyani, Erika Dwi, dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. 2022. "Analisis Pengaruh PMDN Dan PMA Terhadap PDRB Jawa Timur." *Independen: Jurnal Ekonomi* 2(1): 89–100.
- Harefa, SE, AKU, Mandala. 2019. "Pengaruh Kebijakan Dana Bagi Hasil Terhadap Penerimaan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 9(2): 147–60.
- Humaini, Hayatullah, M Safri, dan Etik Umiyati. 2017. "Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi." *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 6(2): 57–64.
- Komarulzaman, Ahmad, dan Armida S Alisjahbana. "Bekerja g Kertas Menguji Hipotesis Kutukan Sumber Daya Alam Di Indonesia : Bukti Di Tingkat Regional Universitas Padjadjaran Menguji Hipotesis Kutukan Sumber Daya Alam Di Indonesia : Bukti Di Tingkat Regional." (6).
- Lingkungan, Terhadap dkk. 2024. "P - ISSN : 2087 – 1058 Dampak Negatif Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) (Dampak Negatif Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin Terhadap Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kalimantan Tengah."
- Lucas, Robert E. 1988. "Laporan Pembangunan Dunia." *Jurnal Ekonomi Moneter* 22(Februari): 3–42. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304393288901687>.
- Paul M. Romer. 1986. "Increasing Returns and Long-Run Growth." *Journal of Political Economy* 94(5): 1002–37. <http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>.
- Rahma, Hania, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Bambang Widjojanto. 2019. "Perkembangan Ukuran Gabungan Pembangunan Berkelanjutan Regional di Indonesia." : 1–16.
- Rahma, Hania, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Bambang Widjojanto. 2021. "Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Fenomena Kutukan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia Fenomena Kutukan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia Pendahuluan." 21(2).
- Ridena, Sedwivia, dan Wawan Hermawan. 2021. "Menguji Keberadaan Kutukan Sumber Daya Alam di Indonesia: Peran Pembangunan Keuangan." 22.
- Sachs, Jeffrey D., dan Andrew M. Warner. 2001. "Kutukan Sumber Daya Alam." *European Economic Review* 45(4–6): 827–38.
- Sholikin, Ahmad. 2018. "Kutukan Sumber Daya Alam." 45(Auty): 827–38. <https://osf.io/preprints/inarxiv/d4shn/>.
- Solow, Robert. 1956. "Kontribusi terhadap Teori Pertumbuhan Ekonomi: Lama dan Baru." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Internasional* 70(1): 65–94. <http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28195602%2970%3A1%3C65%3AACTTTO%3E2.0.CO%3B2-M>.
- Zuada, Husen. 2022. *Booming Nikel Dan Kutukan Sumber Daya Alam* .